

Universitas Ngudi waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora  
Skripsi, 19 Juli 2022  
Ana Nisa'us Sholikhah  
110118A002

## **PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAGELANG PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN PERKANTORAN**

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat Edaran No. KP.03/978-100/VII/2021 tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM. Oleh karena itu peneliti memunculkan rumusan masalah terkait bagaimana pelaksanaan dan tata cara/prosedur Pendaftaran Tanah di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan hambatan yang muncul dalam proses Pendaftaran Tanah yang telah diberikan Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data sekunder.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama masa Pembatasan Kegiatan Perkantoran telah mematuhi aturan sesuai dengan Intruksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Surat Edaran NOMOR 1/SE-33.08.UP.02.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penelitian ini adalah BPN Kabupaten Magelang melakukan pelayanan secara online dengan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan. Hambatan yang muncul dalam pelayanannya yaitu terbatasnya waktu. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam proses pelayanan secara konvensional jauh berkurang, dan lebih mengandalkan pelayanan online yang bisa dilayani dengan sistem *work from home*.

**Kata Kunci :** Pendaftaran Tanah, BPN (Badan Pertanahan Nasional), PPKM

Ngudi Waluyo University  
Study Program of Legal, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Final Project 19 July 2022  
Ana Nisa'us Sholikhah  
110118A002

## **IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION AT THE NATIONAL LAND AGENCY (BPN) MAGELANG REGENCY DURING THE IMPLEMENTATION OF OFFICE ACTIVITIES RESTRICTIONS**

### **ABSTRACT**

The implementation of land registration as explained in the Basic Agrarian Law that land registration aims to ensure legal certainty. In the context of handling the Covid-19 Pandemic, the Government has established the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM). Bureaucratic activities and community services have also been regulated through the Circular Letter of the Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 14 of 2021 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus Employees. The Ministry of ATR/BPN has issued Circular No. KP.03/978-100/VII/2021 concerning the adjustment of the Work System of State Civil Apparatus Employees during the PPKM period. Therefore, the researcher raises the formulation of problems related to how the implementation and procedures/procedures for Land Registration during the Enforcement of Activity Restrictions and obstacles that arise in the Land Registration process that have been given by the State at the Land Office of Magelang Regency.

The method used is a qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. To complete the research data, the authors conducted interviews with related parties as a crosscheck of secondary data.

From the results obtained, it is known that the Land Registration at the Magelang Regency Land Office during the Restriction of Office Activities has complied with the rules in accordance with the Instructions of the Head of the Magelang Regency Land Office with Circular Letter NUMBER 1/SE-33.08.UP.02.03/III/2020 Regarding Follow Up Efforts to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). This research is BPN Magelang Regency provides online services by providing services that can be accessed through the website that has been provided. Barriers that arise in the ministry is limited time. The Land Office of Magelang Regency in the conventional service process is much reduced, and relies more on online services that can be served with a work from home system.

**Keywords:** Land Registration, BPN (National Land Agency), PPKM